

# RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

Renja Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2025 tidak terlepas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dengan perencanaan program kerja Tahunan Kabupaten Magetan dalam satu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Ditetapkan di : Magetan  
Tanggal : 25 - Juli - 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 198809 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> ...	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	15
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD .....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	30
3.3. Program dan Kegiatan .....	33
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visidan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1981);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Magetan tahun 2005 – 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang di operasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung system pengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program kegiatan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan program kegiatan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas program kegiatan.
- e. Memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum : uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan : Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan RKPD

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah : Mencakup evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu dan tahun berjalan terhadap RPJMD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah : Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas : Berisikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan

- dan Fungsi Perangkat Daerah : peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat daerah, serta isu isu strategis lainnya
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD : Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat : Hasil kajian terhadap program kegiatan yang diusulkan para masyarakat dan pengumpulan informasi dan pengamatan lapangan

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional : Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah : Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (pencapaian IKU dan IKD tahun direncanakan)
- 3.3 Program Kegiatan : Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun direncanakan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya

### **BAB V PENUTUP**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magetan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rencana Kerja periode Tahun 2025 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Berbagai kegiatan teoritis dan praktis dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana Kerja ini di selaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode tertentu. Selama periode Tahun Anggaran 2023, besarnya capaian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam Tabel T.C 29 sebagaimana berikut. :

**Tabel T-C. 29**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024  
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.1.1	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	Cakupan potensi yang dipromosikan.    %	85	Persen	85					85	100%
1.1.1.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi.    Kegiatan	17	Kegiatan	17					17	100%
1.1.1.2	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal.    Dokumen	1	Dokumen	1					1	100%
1.1.1.3	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal.    Dokumen	24	Dokumen	24					24	100%
1.1.1.4	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti.    Kegiatan	4	Kegiatan	4					4	100%
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan potensi yang dipromosikan</b>	50	Persen	88	90	90	100%		90	180%
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan promosi dan publikasi    Dokumen</b>	25	Kali	25	8	8	100%		33	132%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi dan Publikasi	24	Kali	24	8	8	100%		32	133%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian promosi    dokumen	1	Dokumen	0	0		#DIV/0!		0	0%
<b>1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Prosentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun    %	40	Prosen						0	0%
1.1.2.1	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen cetak biru penanaman modal yang disusun.    Dokumen	1	Dokumen						0	0%
1.1.2.2	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal.    Dokumen	3	Dokumen						0	0%
1.1.2.3	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah peserta rakor.    Orang	160	Orang						0	0%
<b>1.1.3</b>	<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	Prosentase pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.    %		Prosen						0	#DIV/0!
1.1.3.1	Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	Jumlah monitoring yang dilaksanakan.    Kegiatan	12	Kegiatan						0	0%
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</b>	90	Persen	77	80	80	100%		157	174%
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal    dokumen</b>	5	Dokumen	4	1	1	100%		5	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian penanaman Modal    dokumen	4	Dokumen	3	1	1	100%		4	100%
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen evaluasi Kajian penanaman Modal    dokumen	1	Dokumen	0	1	1	100%		1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.02.2.01.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.    Dokumen	3	Dokumen	3	0	-	#DIV/0!		3	100%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.    Dokumen	2	Dokumen	2	0	-	#DIV/0!		2	100%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal    Dokumen	1	Dokumen	0	0	-	#DIV/0!		0	0%
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal</b>	90	Persen	70	80	80	100%		150	167%
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian penanama modal    dokumen</b>	72	Dokumen	36	24	24	100%		60	83%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal    dokumen	36	Dokumen	12	12	12	100%		24	67%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor dan bimbingan teknis penanaman modal    orang	300	Orang	300	200	200	100%		500	167%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal    dokumen	36	Dokumen	12	12	12	100%		24	67%
<b>1.2.1</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	Prosentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.    %	90	Persen						0	0%
1.2.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.    Dokumen	6500	Dokumen						0	0%
1.2.1.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan.    Dokumen	48	Dokumen						0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.2.1.3	Penyelenggaraan Forum Komunikasi PTSP	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP.    Orang	60	Orang						0	0%
1.2.1.4	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah dokumen penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan.    Dokumen	2	Dokumen						0	0%
1.2.1.5	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah kegiatan penguatan mutu pelayanan.    Kegiatan	2	Kegiatan						0	0%
1.2.1.6	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Prosentase pelayanan publik yang diintegrasikan.   Persen	80	Persen						0	0%
<b>1.2.3</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.    %								0	#DIV/0!
1.2.3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.    %	100	Persen						0	0%
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>	100	Persen	100	100	100	100%		100	100%
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan    bulan</b>	36	Bulan	12	12	12	100%		24	67%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik    dokumen	12.500	Dokumen	11.008	1120	1.120	100%		12128	97%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.    dokumen	72	Dokumen	48	24	24	100%		72	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah penyelenggaraan layanan pengelolaan pengaduan    Bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah anggota forum komunikasi PTSP    Orang	100	Orang	50	20	20	100%		70	70%
<b>1.2.2</b>	<b>Program Pengembangan Database dan Informasi</b>	Prosentase data dan informasi yang dikembangkan.    %	90	Persen				#DIV/0!		0	0%
1.2.2.1	Pengelolaan Data Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data yang dikelola.    Dokumen	18	Dokumen				#DIV/0!		0	0%
1.2.2.2	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan.    Aplikasi	5	Aplikasi				#DIV/0!		0	0%
1.2.2.3	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun.    Unit	10	Unit				#DIV/0!		0	0%
1.2.2.4	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah publikasi dan sosialisasi.    Kali	16	Kali				#DIV/0!		0	0%
<b>1.2.3</b>	<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	persentase pengaduan masyarakat yang tertangani.    %	100	Persen				#DIV/0!		0	0%
1.2.3.1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.    Kali	100	Kali				#DIV/0!		0	0%
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase data dan informasi yang dikembangkan</b>	100	Persen	90	95	95	100%		100%	100%
<b>2.18.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah</b>	<b>Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan    Aplikasi</b>	90	Persen	90	90	90	100%		100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kabupaten/Kota</b>										
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan    aplikasi	6	Aplikasi	3	1	1	100%		4	67%
<b>1.1.1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks kepuasan masyarakat    Angka	80	Angka	80			#DIV/0!		80	100%
1.1.1.1	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan.    Bulan	24	Bulan	24			#DIV/0!		24	100%
1.1.1.2	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.    Dokumen	2	Dokumen	2			#DIV/0!		2	100%
1.1.1.3	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran.    Bulan	24	Bulan	24			#DIV/0!		24	100%
<b>2.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi    %	90	Persen	90			#DIV/0!		90	100%
2.1.2.1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional hasil pengadaan.    Unit	5	Unit	5			#DIV/0!		5	100%
2.1.2.2	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun.    Unit	1	Unit	1			#DIV/0!		1	100%
2.1.2.3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.    Unit	100	Unit	100			#DIV/0!		100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.1.2.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor.    Gedung	3	Gedung	3			#DIV/0!		3	100%
2.1.2.5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor.    Kali	24	Kali	24			#DIV/0!		24	100%
2.1.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.    Kali	26	Kali	26			#DIV/0!		26	100%
<b>3.1.3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas    %	100	Persen	100			#DIV/0!		100	100%
3.1.3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan.    Stel	80	Stel	80			#DIV/0!		80	100%
<b>4.1.4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi.    %	100	Persen	100			#DIV/0!		100	100%
4.1.4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.    Orang	20	Orang	20			#DIV/0!		20	100%
4.1.4.2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis.    Orang	80	Orang	80			#DIV/0!		80	100%
<b>5.1.5</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	persentase penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu.    %	100	Persen	100			#DIV/0!		100	100%
5.1.5.1	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun.    Dokumen	4	Dokumen	4			#DIV/0!		4	100%
5.1.5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang	13	Dokumen	13			#DIV/0!		13	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		disusun.    Dokumen									
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	80	Angka	87	80	98,71	123%		166,51	208%
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan    dokumen</b>	8	Dokumen	5	3	3	100%		8	100%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun.    Dokumen	5	Dokumen	4	1	1	100%		5	100%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Survey Kepuasan Masyarakat.    Dokumen	3	Dokumen	2	1	1	100%		3	100%
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Keuangan	51	Dokumen	42	14	14	100%		56	110%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji Pegawai    dokumen	45	Dokumen	42	14	14	100%		56	124%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun.    dokumen	6	Dokumen	5	1	1	100%		6	100%
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.    Orang	55	Orang	55	40	40	100%		95	173%
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan    Stell	120	stell	-	5	-	0%		5	4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis    Orang	55	Orang	55	40	40	100%		95	173%
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran    bulan	12	Bulan	12	12	12	100%		24	200%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor    unit	114	Unit	24	12	12	100%		36	32%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran   Bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor    Bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan   bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas aparatur    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah penyediaan jasa perkantoran    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya    unit	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor    bulan	36	Bulan	24	12	12	100%		36	100%
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45	Unit	16	13	11	85%		29	64%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan    Kendaraan	42	Kendaraan	26	14	14	100%		40	95%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.    Gedung	3	Gedung	2	1	1	100%		3	100%

### **2.1.1 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, akan diketahui realisasi program atau kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan kinerja OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan pencapaian anggaran pelaksanaan renja tahun lalu menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dalam mendorong investor melakukan penyampaian LKPM dan berupaya memberikan iklim penanaman modal yang kondusif. Pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diperlukan pengoptimalan pengendalian penanaman modal yang meliputi pemantauan penanaman modal, pembinaan penanaman modal dan pengawasan penanaman modal, meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi, peningkatan proses pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik baik melalui OSS ataupun aplikasi SIMPADU melalui pengembangan aplikasi, meningkatkan sarana dan prarana di Mal Pelayanan Publik. Dengan demikian beberapa program yang akan menjadi konsentrasi DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/proses/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja DPMPTSP dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada APBD Kabupaten tahun anggaran 2023, DPMPTSP telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media kinerja terutama yang kemudian dibandingkan dengan realisasi. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran, data hasil, mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode sesuai tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai realisasi investasi			250.M	300.M	400.M	1.500 M	1,551 M	1,580 M	600 M	700 M	
2	Jumlah investor.			450	875	1120	1380	4392	15803	1.400	1.450	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.			78	79	80	81	98.71	98.04	88	88.5	
4.	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani..			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Magetan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Penanaman Modal di Kabupaten Magetan. Kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan rencana kerja dan rencana strategis periode sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2024 – 2026.

Permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magetan diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
2. Penyempurnaan sistem *Online Single Submisiion* (OSS) sesuai dengan perkembangan
3. Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif penanaman modal untuk investor baru. Fasilitas Penanaman Modal berupa pemberian fasilitas pengurusan dokumen perijinan bagi pelaku usaha yang kesulitan melakukan pengurusan dokumen. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
4. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi yang belum optimal
5. Masih terbatasnya data informasi mengenai pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah menjadi Potensi Investasi Regional melalui data potensi penanaman modal
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga mempengaruhi nilai investasi.

### **2.3.1. Tantangan**

Untuk itu perlu diuraikan tantangan dan peluang demi pengembangan pelayanan tersebut. Tantangan kedepan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut:

1. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan.
2. Belum kondusifnya iklim investasi yang menyangkut perbaikan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi, efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas.
3. Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik yang berusaha menarik investor ke daerahnya.
4. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam mendukung pencapaian tujuan membuka peluang Investasi.
5. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik.
6. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

### **2.3.2. Peluang**

Adapun peluang bagi pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Potensi investasi yang melimpah.
2. Terjalannya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan.



3. Terbukanya peluang dan kesempatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, dengan mengikuti jenjang pendidikan formal, bintek, workshop maupun seminar.
4. Terbukanya peluang kerjasama antar pemerintah daerah, instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
6. Kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung percepatan investasi dan penyederhanaan pelayanan perizinan.
7. Regulasi yang memungkinkan daerah memberikan insentif kepada investor.
8. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan terjangkau, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penerapan e-government dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
9. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasad/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada DPMPTSP Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 2.3

**Tabel 3.1**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kepuasan ASN DPMPPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPPTSP</b>			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kepuasan ASN DPMPPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPPTSP</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Magetan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	33.872.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	3.078.721.228	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Magetan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	2.967.049.291

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Magetan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.000.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Magetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	60.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Magetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	110.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Magetan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	54.518.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	223.286.288
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Magetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Magetan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.880.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Magetan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.585.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.500.000

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab Magetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182.770.136
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Magetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.275.000



No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Magetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Magetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Gedung	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Magetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Gedung	129.450.000
	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Kab Magetan	<b>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</b>			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Kab Magetan	<b>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</b>		

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Magetan	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal    dokumen</b>			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab Magetan	<b>Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal    dokumen</b>		
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab Magetan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4 Dokumen	20.000.000	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kab Magetan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	0 Dokumen	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab Magetan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	60.000.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab Magetan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	24.667.000
	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Cakupan potensi yang dipromosikan</b>			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Cakupan potensi yang dipromosikan</b>		

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi</b>			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pameran investasi dan Jumlah publikasi dan sosialisasi</b>		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen	650.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab Magetan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen	466.153.000
	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.</b>		
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</b>		

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	8.662.000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4250 Pelaku Usaha	225.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	146.179.000
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab Magetan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	50.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab Magetan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	31.736.000

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	20 Kegiatan Usaha	30.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	15.640.000
	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal</b>			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal</b>		
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen pengendalian penanama modal</b>			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen pengendalian penanama modal</b>		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kab Magetan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	50 Kegiatan Usaha	65.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kab Magetan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	50 Kegiatan Usaha	59.211.000

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	250.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab Magetan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha	227.110.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	150.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab Magetan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	128.423.000

No	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan</b>			<b>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan</b>			
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan</b>			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan</b>			
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Magetan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	150.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Magetan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	48.225.000	
JUMLAH					7.053.721.228	JUMLAH					5.708.721.715



Dalam Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 terdapat perbedaan antara Pagu Sub Kegiatan dengan Pagu Sub Kegiatan pada Hasil Analisa Kebutuhan. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengurangan pagu yang disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga dilakukan penyesuaian jumlah pagu pada masing – masing sub kegiatan agar cukup dan sesuai dengan pagu total yang ditetapkan.

## **2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam pelaksanaan musrenbang tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang menunjang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana disajikan dalam tabel T.C. 3.2

**Tabel T.C 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Magetan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi**

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu kegiatan baik pada perusahaan maupun daerah dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi maupun membuka peluang usaha baru untuk memperoleh keuntungan. Penanaman modal dalam bentuk investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan menyebabkan penyerapan angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja.

Salah satu faktor untuk menaikkan pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu dari ciri negara sedang berkembang adalah tidak adanya modal yang mencukupi untuk pembangunan. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses penanaman modal atau investasi. Hal ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi semakin kondusif.

Di Indonesia, kelembagaan, keamanan, ekonomi lokal, ketenagakerjaan dan infrastruktur menjadi faktor-faktor yang memberatkan investasi. Kelembagaan disini termasuk didalamnya pelayanan perizinan. Salah satu langkah nyata reformasi di sektor perizinan adalah dengan melakukan pembenahan pada institusi yang sebelumnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan perijinan. Bentuk nyatanya antara lain dengan diperkenalkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagai jawaban atas kelambanan prosedur selama ini akibat terlampau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui ketika mengurus sebuah perizinan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sebuah institusi pelayanan terpadu satu pintu sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan nonperizinan yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan

Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan antara lain terkait penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) di daerah untuk percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri nomor 503/4033/SJ, bahwa daerah agar mendukung kesiapan PTSP kabupaten/kota dalam menghadapi implementasi program *Online Single Submission* (OSS) tersebut dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dan penyederhanaan pelayanan dengan penggunaan tanda tangan digital untuk seluruh jenis layanan sehingga penyelesaian layanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dan lebih akurat tanpa terkendala oleh batasan proses, ruang, dan waktu.

Sejalan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Kebijakan Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur mengarah pada sistem kemitraan, dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat yang bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ekonomi kedepan, implementasi pembangunan hendaknya memastikan agar tingkat ketimpangan sosial (*social inequality*) antara kelompok sosial kaya dan miskin, maupun perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) semakin mengecil. Selain itu pembangunan juga tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektoral, tapi juga perhatian secara simultan terhadap pembangunan antar kawasan sehingga masing - masing kawasan di Jawa Timur dan maju dan sejahtera bersama.

## **3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah meningkatnya daya tarik investasi

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh badan dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan adalah suatu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan telah merumuskan sasaran berikut indikator keberhasilannya. DPMPTSP Kabupaten Magetan merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu :

1. Meningkatnya Jumlah Investor.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP

TABEL TC. 25

<b>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</b>						
<b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 - 2026</b>						
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-</b>		
				<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi		Nilai Realisasi investasi	600 Milyar Rupiah	700 Milyar Rupiah	800 Milyar Rupiah
		Meningkatnya Jumlah Investor	Jumlah Pelaku Usaha yang Berizin	4.000	4.200	4.300
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98	98	98
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPMPPTSP	Nilai SAKIP DPMPPTSP Magetan	94	94,25	94,50

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program dan Kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Magetan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah

##### **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

##### **1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan

##### **1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Perlengkapan dan Perlatan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan'
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.**

- 2.1 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - a. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

## **3. Program Promosi Penanaman Modal**

- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

## **4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

- 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

## **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- b. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- c. Pengawasan Penanaman Modal

## **6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan :

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana disajikan dalam Tabel TC 33.

### 3.4 Cacading

Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagai berikut :

TUJUAN	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator : Pertumbuhan Ekonomi						
SASARAN	Meningkatnya Investasi Daerah						
	Indikator : Nilai Realisasi Investasi						
TUJUAN OPD	Meningkatnya Daya Tarik Investasi						
	Indikator : Nilai Realisasi Investasi						
SASARAN OPD	Meningkatnya Jumlah Investor						
INDIKATOR SASARAN	Indikator : Jumlah Pelaku Usaha Berizin						
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
KEGIATAN	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota		Pembuatan Peta Investasi Kabupaten / Kota		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
SUB KEGIATAN	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang di Hadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
					Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Pengawasan Penanaman Modal

TUJUAN	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi						
	Indikator : Pertumbuhan Ekonomi						
SASARAN	Meningkatnya Investasi Daerah						
	Indikator : Nilai Realisasi Investasi						
TUJUAN OPD	Meningkatnya Daya Tarik Investasi						
	Indikator : Nilai Realisasi Investasi						
SASARAN OPD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan		
INDIKATOR SASARAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu				% Pengaduan Masyarakat yang Tertangani		
PROGRAM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
KEGIATAN	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Kabupaten / Kota		
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pemanantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik						

### 3.5 Crosscutting

Cross Cutting adalah penjabaran dari instansi atau OPD mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan program kerjanya. Crosscutting DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai berikut :

No	Dinas / Instansi	Crosscutting
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	- Pemberi rekomendasi perijinan sektor pariwisata - Kerjasama dalam penyusunan profil potensi investasi sektor kebudayaan dan pariwisata
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Pemberi rekomendasi perijinan sektor perindustrian dan perdagangan
3	Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebunan	- Pemberi rekomendasi perijinan sektor pertanian
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	- Pemberi rekomendasi perijinan sektor peternakan dan perikanan
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait tata ruang
6	Dinas Perhubungan	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait angkutan jalan
7	Dinas Tenaga Kerja	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait lembaga pelatihan kerja
8	Dinas Perumahan dan Pemukiman	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait perumahan dan pemukiman
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait Lingkungan
10	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	- Pemberi rekomendasi perijinan terkait koperasi - Kerjasama terkait pengumpulan data usaha mikro yang berizin dan belum berizin
11	Dinas Kesehatan	- Pemberi rekomendasi perijinan bidang kesehatan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Penyediaan jaringan internet penunjang pelayanan publik - Kerjasama terkait publikasi promosi - Kerjasama terkait pengembangan aplikasi penunjang pelayanan
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	- Kerjasama dalam upaya pemantauan dan pengawasan kesesuaian ijin dengan pelaksanaan
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian	- Kerjasama sebagai mitra dalam penyusunan kajian atau

No	Dinas / Instansi	Crosscutting
	Dan Pengembangan Daerah	penyusunan peta dan profil investasi
15	Bagian Organisasi	- Koordinasi dalam penyusunan dan review standar pelayanan dan standar operasional prosedur terkait pelayanan publik
16	Bagian Hukum	- Koordinasi dalam penerbitan produk hukum yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Tabel T.C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN DPMPPTSP terhadap Layanan Kesekretariatan DPMPPTSP								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	4 Dokumen	5.000.000	DAU		5 Dokumen	30.000.000	DPMPPTSP
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	1 Laporan	33.872.000	DAU	Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa di Pasal 1 Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala	2 Laporan	70.000.000	DPMPPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	23 Orang/ Bulan	2.967.049.291	DAU		23 Orang/ Bulan	3.078.721.228	DPMPPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	Kabupaten	12 Laporan	3.000.000	DAU		12 Laporan	30.000.000	DPMPPTSP

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Magetan							
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur</b>								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Magetan	0 Paket		DAU	Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menggunakan Pakaian Dinas Khusus	40 Paket	70.000.000	DPMPTSP
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Magetan	40 Orang	54.518.000	DAU	Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.	40 Orang	120.000.000	DPMPTSP
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Paket	26.500.000	DAU		12 Paket	45.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Paket	223.286.288	DAU		12 Paket	325.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Paket	30.000.000	DAU		12 Paket	55.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Paket	62.880.000	DAU		12 Paket	90.000.000	DPMPTSP

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Paket	16.585.000	DAU		12 Paket	65.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Dokumen	9.500.000	DAU		12 Dokumen	17.500.000	DPMPTSP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Magetan	12 Laporan	120.000.000	DAU		12 Laporan	175.000.000	DPMPTSP
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	182.770.136	DAU		12 Laporan	225.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	60.000.000	DAU		12 Laporan	90.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	12 Laporan	528.275.000	DAU		12 Laporan	750.000.000	DPMPTSP
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Magetan	16 Unit	100.000.000	DAU		16 Unit	110.000.000	DPMPTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	2 Gedung	129.450.000	DAU		2 Gedung	300.000.000	DPMPTSP
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM</b>	<b>Persentase kebijakan</b>								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>peningkatan iklim investasi yang disusun</b>								
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan/ Insentif Penanaman Modal</b>								
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kabupaten Magetan	0 Dokumen		DAU		5 Dokumen	25.000.000	DPMPTSP
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang disusun</b>								
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kabupaten Magetan	1 Daerah	24.667.000	DAU		1 Daerah	60.000.000	DPMPTSP
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Cakupan Potensi yang di Promosikan</b>								
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>								
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Kabupaten Magetan	8 Dokumen	466.153.000	DAU		8 Dokumen	650.000.000	DPMPTSP
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Operasional Prosedur</b>								
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	8.662.000	DAU		2 Dokumen	50.000.000	DPMPTSP



KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
		yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota								
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Magetan	2000 Pelaku Usaha	149.179.000	DAU		4500 Pelaku Usaha	250.000.000	DPMPTSP
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Magetan	40 Pelaku Usaha	31.736.000	DAU		30 Pelaku Usaha	30.000.000	DPMPTSP
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kabupaten Magetan	12 Kegiatan Usaha	15.640.000	DAU		25 Kegiatan Usaha	35.000.000	DPMPTSP
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Operasional Prosedur</b>								
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>								
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Kabupaten Magetan	50 Kegiatan Usaha	59.211.000	DAK Non Fisik		50 Kegiatan Usaha	75.000.000	DPMPTSP
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	Kabupaten Magetan	250 Pelaku Usaha	227.110.000	DAU & DAK Non Fisik		300 Pelaku Usaha	300.000.000	DPMPTSP

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
		Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kabupaten Magetan	50 Kegiatan Usaha	128.423.000	DAU & DAK Non Fisik		50 Kegiatan Usaha	175.000.000	DPMPTSP
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Data dan Sistem Informasi yang dikembangkan</b>								
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data yang di Kembangkan</b>								
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	48.255.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000	DPMPTSP
<b>TOTAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>					<b>5.708.721.715</b>				<b>7.446.221.228</b>	

### 3.6 Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Kabupaten

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	RENCANA AKSI	OUTCOME/OUTPUT		URAIAN KEGIATAN RENCANA AKSI	OPD
			SATUAN	INDIKATOR		
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>					
<i>Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan</i>	<i>Persentase Pertumbuhan Investasi</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</i>	<i>angka</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Pemohon Ijin terhadap Pelayanan Perizinan</i>		
			dokumen		Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan	DPMPTSP
			kegiatan		Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait fasilitasi perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha	DPMPTSP
		<i>Meningkatkan Daya Tarik Investor</i>	%	<i>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</i>		
			dokumen		Melakukan kegiatan updating data profil dan peluang investasi di Kabupaten Magetan	DPMPTSP
			kegiatan		Melaksanakan kegiatan Forum Bisnis	DPMPTSP
			kegiatan		Melakukan Promosi Investasi melalui pemasangan baliho diluar daerah	DPMPTSP
			kegiatan		Mengikuti Kegiatan Pameran Investasi	DPMPTSP

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sesuai dengan usulan Program Kegiatan Tahun 2025 pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						5.708.721.715,00								7.512.985.864,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.708.721.715,00								7.512.985.864,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.708.721.715,00								7.512.985.864,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Kepuasan ASN DPMPSTP Terhadap Layanan Keseekretariat DPMPSTP</i>	-			88 Angka	4.552.685.715,00						-	5.682.985.864,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Susun Tepat Waktu</i>	-			18 Dokumen	38.872.000,00				Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi 5. Peningka tan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintah an	-	-	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	5.000.000,00	-		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan memba ngun keunggulan ekonomi 5. Peningka tan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintah an	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				11 Laporan	33.872.000,00	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah</i>	-			100 %	2.970.049.291,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTSP Magetan	-	3.145.485.864,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				23 Orang/bulan	2.967.049.291,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTSP Magetan		3.115.485.864,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	3.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTSP Magetan		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian Sesuai Prosedur</i>	-			38 Orang	54.518.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTSP Magetan	-	190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				0 Paket	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTSP Magetan		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				38 Orang	54.518.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pegawai DPMPSTP Magetan		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			84 Paket	488.751.288,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	772.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	26.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	16.585.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	9.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	120.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			36 Laporan	771.045.136,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	1.065.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	182.770.136,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	528.275.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		750.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	-			18 Unit	229.450.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	410.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	129.450.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun</i>	-			100 %	24.667.000,00						-	85.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan/ Insentif Penanaman Modal</i>	-			0 Dokumen	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				0 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	24.667.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	24.667.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Cakupan Potensi yang di Promosikan</i>	-			100 %	466.153.000,00						-	650.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</i>	-			8 Kali	466.153.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				8 Dokumen	466.153.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Pelayanan yang Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur</i>	-			100 %	202.217.000,00						-	395.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	-			2053 Dokumen	202.217.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Masyarakat di Kabupaten Magetan	-	395.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	8.662.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Masyarakat di Kabupaten Magetan		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				2000 Pelaku Usaha	146.179.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Masyarakat di Kabupaten Magetan		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				40 Pelaku Usaha	31.736.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Masyarakat di Kabupaten Magetan		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				12 Kegiatan Usaha	15.640.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Masyarakat di Kabupaten Magetan		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Pengendalian Penanaman Modal</b>	-			100 %	414.744.000,00						-	550.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Fasilitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	-			250 Pelaku Usaha	414.744.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Pelaku Usaha di Kabupaten Magetan	-	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				50 Kegiatan Usaha.	59.211.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi	Pelaku Usaha di Kabupaten Magetan		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				250 Pelaku Usaha	227.110.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pelaku Usaha di Kabupaten Magetan		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				50 Kegiatan Usaha	128.423.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	Pelaku Usaha di Kabupaten Magetan		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Data dan Sistem Informasi yang di Kembangkan</i>	-			100 %	48.255.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data Sistem Informasi Pengelolaan Data yang di Kembangkan</i>	-			1 Dokumen	48.255.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	48.255.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi 5. Peningkatan Digitalisasi Layanan Pemerintah dan Penataan Manajemen Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			<b>JUMLAH</b>					<b>5.708.721.715,00</b>							<b>7.512.985.864,00</b>	

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan disusun berdasarkan hasil rumusan dan penyusunan prioritas kegiatan Tahun 2025 telah memperhatikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memuat 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan mewujudkan visi misi Kabupaten Magetan. Semoga rencana kerja ini dapat dijadikan acuan kerjanya bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001





[www.dpmptsp.magetan.go.id](http://www.dpmptsp.magetan.go.id)

**MAGETAN  
SARANGAN  
LAKE TO REMEMBER**